



BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN 2021

**BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah sehingga Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk publikasi kinerja, yang menggambarkan hasil kegiatan dan capaian kinerja Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, baik dalam skala nasional

maupun internasional yang bersifat teknis maupun administratif. Dengan adanya publikasi ini diharapkan dapat diidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program kegiatan demi peningkatan kontribusi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam program pengawasan obat BPOM di masa mendatang khususnya terkait kerja sama dan hubungan masyarakat.

Selama tahun 2021, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan kepala BPOM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara konsisten melakukan *continuous improvement* di berbagai bidang antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai implementasi program reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju *good governance* dan *clean government*.

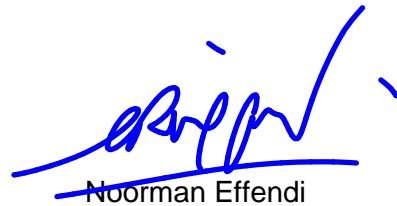
Laporan ini merupakan rangkuman dari laporan kegiatan dan capaian yang diselenggarakan oleh beberapa kelompok substansi di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat selama tahun 2021. Kegiatan yang dilakukan mencakup kegiatan dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 khususnya terkait ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia.



Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kami mengharapkan saran dan masukan agar laporan kegiatan tahun yang akan datang dapat lebih baik dan bermanfaat.

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya bagi pejabat dan staf di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Jakarta, April 2022
Kepala Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat,



Noorman Effendi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
HIGHLIGHT KEGIATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Instansi	1
A.1. Visi dan Misi	1
A.2. Tujuan	1
A.3. Tugas dan Fungsi.....	2
A.4. Budaya Organisasi	2
A.5. Struktur Organisasi.....	4
B. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator.....	5
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	8
A. Sumber Daya Manusia.....	8
A.1. Data Kepegawaian	8
A.2. Kebutuhan Pelanggan	10
A.3. Peningkatan Kompetensi SDM.....	10
B. Sarana dan Prasarana	11
C. Anggaran	11
BAB III HASIL KEGIATAN BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT.....	13
A. Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global.....	13
A.1. IKK 1: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan... 13	
A.2. IKK 2: Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	15
B. Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	17
B.1. IKK 3: Indeks kepuasan media	17
B.2. IKK 4: Indeks Opini Publik	23
B.3. IKK 5: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	26
C. Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM.....	28
D. Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional.....	31
E. Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	33

E.1. IKK 8: Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	33
E.2. IKK 9: Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	36
E.3. IKK 10: Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting.....	39
F. Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	40
G. Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal.....	46
H. Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas.....	49
I. Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel.....	50
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Core Value BERAKHLAK	3
Gambar 2. Budaya Kerja PIKKIR	4
Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....	5
Gambar 4. Gambar Peta Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....	6
Gambar 5. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	9
Gambar 6. Data Pegawai Berdasarkan Usia	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.	6
Tabel 2.Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja.....	10
Tabel 4. Kebutuhan Sarana dan Prasarana	11
Tabel 5. Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2021.....	12
Tabel 6. Indeks Kepuasan Media BPOM Tahun 2021	18

HIGHLIGHT 2021

BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



MARET

Knowledge Sharing antara Badan POM dengan National Center for Expertise of Medicines and Medical Devices (NCEMMD) Kazakhstan

Knowledge Sharing diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2021 dengan tema “Strengthening Cooperation in The Field of Medicines Control Through Knowledge Sharing”. Kegiatan ini

merupakan bentuk implementasi Action Plan dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan POM dan NCEMMD yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2016 dan berlaku sampai dengan 2 November 2022. Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan POM dan dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Republik Kazakhstan Rahmat Pramono, Direktur Jenderal NCEMMD Kazakhstan, Dautbayev Ekren Karimovich, dan perwakilan dari Badan POM, NCEMMD Kazakhstan, serta industri farmasi dari Indonesia dan Kazakhstan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pertukaran informasi terkait pengawasan obat, khususnya mengenai GMP termasuk keanggotaan Badan POM dalam PIC/s, Pharmacovigilance (PV), Standar dan Regulasi termasuk Registrasi. Program ini juga wujud komitmen Badan POM untuk mendorong kolaborasi industri farmasi sebagai sesama anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk webinar yang terdiri dari 3 (tiga) sesi dengan topik Good Manufacturing Practice (GMP), Standar dan regulasi obat, dan Pharmacovigilance. Masing-masing topik webinar disampaikan oleh narasumber yang berasal dari regulator kedua negara dan dihadiri oleh 150 peserta secara daring yang terdiri dari regulator Badan POM, regulator NCEMMD Kazakhstan serta pelaku usaha dari Indonesia dan Kazakhstan.



Knowledge Sharing antara Badan POM dengan National Center for Expertise of Medicines and Medical Devices (NCEMMD) Kazakhstan



Badan POM Perkuat Kerja Sama Internasional Untuk Percepat Pengembangan Vaksin COVID-19



Pertemuan Kepala Badan POM dengan Pimpinan National Institute of Pharmacy and Nutrition, Hongaria



Pertemuan Kepala Badan POM dengan The State Institute of Drugs and Good Practices (SID&GP) di Rusia

Pada 2-11 Juni 2021 lalu, Kepala Badan POM bertemu dengan Pimpinan *National Institute of Pharmacy and Nutrition (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet - OGYEI)* di Hongaria, Federal Service for Surveillance in Healthcare (Roszdravnadzor) dan *The State Institute of Drugs and Good Practices (SID&GP)* di Rusia. Tujuan pertemuan dengan *National Regulatory Authorities* tersebut adalah untuk mengawal pengembangan vaksin dalam rangka mempercepat akses dan ketersediaan vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu di masyarakat.



Pertemuan Kepala Badan POM dengan Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology



Pertemuan Kepala Badan POM dengan BIOCAD

Dalam kesempatan tersebut, Badan POM juga menjajaki potensi pengembangan, keamanan dan kualitas vaksin Covid-19 dengan pusat riset bioteknologi Rusia yaitu *Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology* dan Biocad. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19 sekaligus mendorong kerja sama industri farmasi untuk membuka peluang ekspor bagi Industri Farmasi Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Teten Masduki telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Obat Tradisional Kosmetik dan Pangan Olahan** pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (*World Food Safety Day*) 2021 pada tanggal **22 Juni 2021**.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pendampingan kepada para pelaku usaha. Kepala Badan POM mengungkapkan bahwa dukungan yang intensif bagi UMKM hanya dapat terwujud dengan sinergi antar Kementerian/ Lembaga.



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

SEPTEMBER

Badan POM Kawal Transfer Teknologi Obat dan Vaksin dan Pengembangan Ekosistem Inovasi di Bidang Obat dan Vaksin di Indonesia



Pada 12-28 September 2021, Kepala Badan POM mendampingi proses penandatanganan kesepakatan kerja sama pengembangan vaksin Covid-19 menggunakan *platform* protein subunit antara PT Bio Farma dengan Baylor College of Medicine (BCM), Houston, Texas, Amerika Serikat.



Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan POM bersama dengan Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri Kesehatan mendampingi PT Bio Farma melakukan peninjauan kerja sama dengan Moderna Therapeutics Inc di Cambridge yang merupakan produsen Vaksin Moderna. Badan POM juga melakukan kunjungan untuk mengawal peninjauan kerja sama antara perusahaan bioteknologi Indonesia (PT Etana Biotechnologies

Indonesia dan PT Kalbe Genexine Biologics) dengan berbagai institusi riset di Amerika Serikat seperti *Ipsen Innovation Center*, *Massachusetts Biotechnology Council* (MassBio), *Broad Institute* serta *Johnson & Johnson Labs* (JLABS) @ LabsCentral.

NOVEMBER

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Badan POM untuk Instituto para A

Qualidade de Timor-Leste, I.P (IQTL, I.P.), Republik Demokratik Timor-Leste

Badan POM telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dalam kerangka program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Republik Demokratik Timor-Leste yang berupa “Workshop Pengujian Pangan dalam rangka Dukungan Badan POM untuk Perkuatan Pengawasan Pangan di Timor-Leste” kepada regulator dari Instituto para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL, I.P.) pada 29 November – 3 Desember 2021 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dan kontribusi Badan POM sebagai regulator di bidang pengawasan obat dan makanan terhadap Program KSS yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional (ProPN). Workshop dibuka pada Senin, 29 November 2021 oleh Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan POM, yang menyampaikan bahwa melalui program KSS ini, Badan POM berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada Timor-Leste guna meningkatkan pengawasan pangan di Timor-Leste yang berfokus pada pengujian laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah Timor-Leste.



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Instansi

A.1. Visi dan Misi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Utama yang memberikan dukungan manajemen di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendukung pencapaian visi dan misi BPOM yaitu:

Visi:

“Obat dan Makanan Aman meningkatkan Kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa”

Misi:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

A.2. Tujuan

Sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Utama, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Utama BPOM, yaitu:

- a. Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama; dan
- c. Terwujudnya Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional dan inovatif.

A.3. Tugas dan Fungsi

Untuk memastikan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut, serta berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatanselatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dan opini publik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

A.4. Budaya Organisasi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat senantiasa mengedepankan penerapan *Core Value* Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Budaya Organisasi BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. *Core value* dan budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.

Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Sebagai ASN, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menerapkan *core value* BERAKHLAK seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Core Value BERAKHLAK

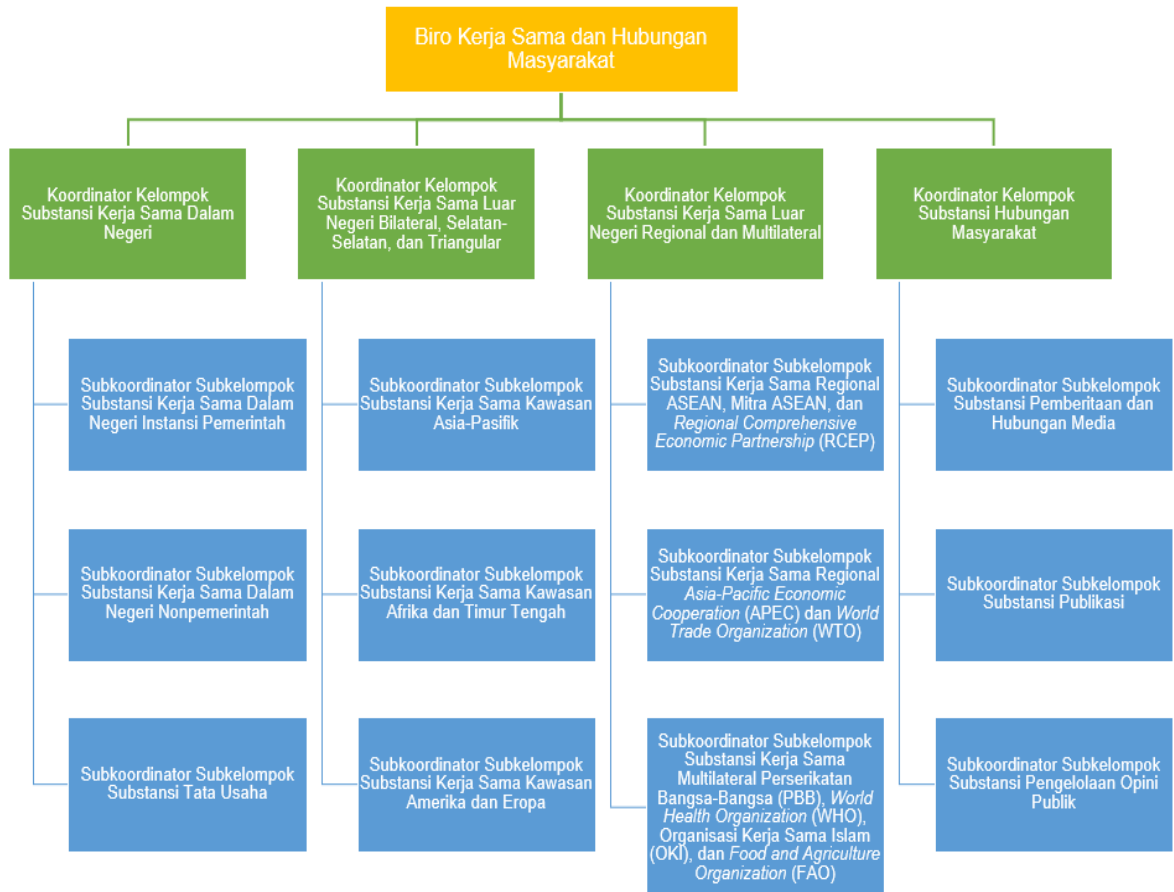
Core value ini senantiasa diterapkan melalui 6 (enam) budaya kerja yang disingkat dalam akronim PIKKIR, dengan penjelasan seperti pada Gambar 2:



Gambar 2. Budaya Kerja PIKKIR

A.5. Struktur Organisasi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara struktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama BPOM. Sejalan dengan penyederhaan organisasi dan birokrasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung dengan Jabatan Fungsional dengan dukungan coordinator dan sub koordinator, seperti pada Gambar 1.



Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

B. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator

Untuk mengukur kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyusun peta strategi, sasaran dan indikator sebagai berikut:

Perkembangan situasi dan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal mempengaruhi fungsi strategis BPOM dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 4 Gambar Peta Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Pada tahun 2021, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki 9 Sasaran Program dan 14 indikator sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84
2.	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	84
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan media	74
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks opini publik BPOM	78

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,84
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	82
7	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	1
8.	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,60
9.	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	65
10	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	80
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas	75
12.	Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	81
13	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks pengelolaan data dan informasi	2
14.	Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90 (Efisien)

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung oleh 4 (empat) kelompok substansi dengan jumlah pegawai pada tahun 2021 terdiri dari 56 (lima puluh enam) orang, yang terdiri dari 40 orang PNS dan 16 (enam belas) orang staf pramubakti.

A.1. Data Kepegawaian

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat saat ini didukung dengan mayoritas SDM yang berpendidikan Pascasarjana (S2) dan Sarjana dalam usia produktif. Gambaran SDM Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan pendidikan seperti pada Tabel 2.

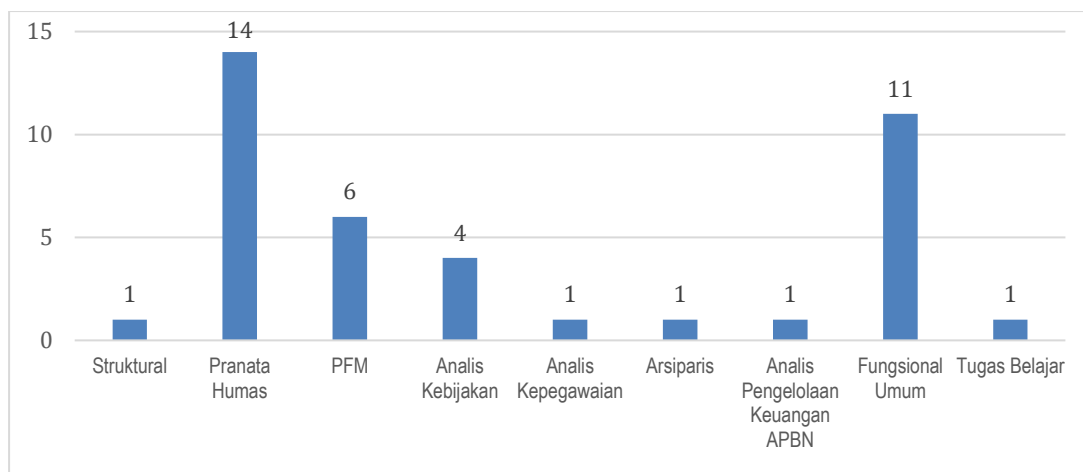
Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	ASN		Pramubakti	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S2	11	19,64%	0	0
S1 Apoteker	6	10,71%	0	0
S1	18	32,14%	13	23,21%
D3, D4 dan sarjana Muda	4	7,14%	2	3,57
SLTA/Sederajat	1	1,78%	1	1,78%
Total	40	71,43%	16	28,57%

Dari latar belakang pendidikan, sebanyak 55,35% pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah sarjana, diikuti oleh pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 19,64%, pendidikan Diploma dan SLTA 14,28% dan S1 Apoteker sebanyak 10,71%.

2) Berdasarkan Jabatan

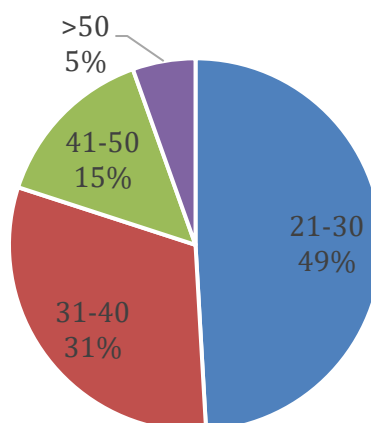
Dari 40 orang PNS, 1 (satu) orang menduduki jabatan struktural, 28 orang menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT), dan 11 orang menduduki jabatan fungsional umum. Selain itu, terdapat 1 (satu) Pejabat Fungsional yang mengikuti Tugas Belajar. Gambaran data pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan jabatan sebagaimana Gambar 5.



Gambar 5. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

3) Berdasarkan Usia

Pegawai Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat termuda berusia 24 tahun dan tertua 57 tahun dengan sebaran seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. Data Pegawai Berdasarkan Usia

Pada tahun 2021, populasi terbesar PNS Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah usia 21-30 tahun yaitu sebesar 49%, diikuti oleh kelompok usia 31-40 tahun ke atas yaitu sebesar 31%.

4) Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dihitung pada tahun 2021, kebutuhan SDM di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan jabatan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja

No	Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
1	Pranata Humas Madya	5	3	2
2	Pranata Humas Muda	10	7	3
3	Pranata Humas Pertama	15	6	9
4	Analisis Kebijakan Madya	4	0	4
5	Analisis Kebijakan Muda	8	0	8
6	Analisis Kebijakan Pertama	16	6	10
7	Perencana Muda	1	0	1
8	Perencana Pertama	1	0	1
9	Pranata Komputer Madya	1	0	1
10	Pranata Komputer Muda	2	0	2
11	Pranata Komputer Pertama	4	1	3
12	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	2	1	1
13	Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	2	2	0
14	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	2	0	2
15	PFM Ahli Muda	1	3	1
16	PFM Ahli Pertama	2	2	0
17	Arsiparis Muda	1	0	1
18	Arsiparis Pertama	1	0	1
19	Arsiparis Penyelia	2	0	2
20	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
21	Arsiparis Pelaksana	2	1	1
22	Analisis Kepegawaian Muda	2	1	1
23	Analisis Kepegawaian Pertama	2	0	2
24	Penata Laksana Barang	2	0	2
25	Penerjemah Muda	2	0	2
26	Penerjemah Pertama	4	0	4
27	Sekretaris	1	0	1
28	Pranata Komputer Terampil (JFU)	1	1	0
29	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFU)	1	1	0
30	Pengelola BMN (JFU)	2	2	0
Total		100	37	63

A.2. Kebutuhan Pelanggan**A.3. Peningkatan Kompetensi SDM**

Untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab pelaksanaan program dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan, yang semakin besar, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah pegawai saat ini, maka Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat membuat usulan perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan dan pendidikan pelatihan.

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2021, yaitu Tugas Belajar atas nama Wulan Kusumaningtyas, S.Sos. dengan mengambil Program Studi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, Jakarta.

Sedangkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas, Jakarta, 19 Januari 2021
- 2) Bimbingan Teknis Penyusunan SKP dan Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional, Jakarta, 11 Februari 2021
- 3) Webinar BPOM dengan *Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia: Regulation of Complementary Medicines in Australia*, Jakarta, 30 April 2021
- 4) Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi di Bidang Obat dan Makanan, Jakarta, 13 Agustus 2021

B. Sarana dan Prasarana

Situasi Pandemi COVID-19, memerlukan dukungan alat pengolah data khususnya laptop sebagai pendukung pelaksanaan *Work From Home (WFH)*. Selain itu, terdapat kebutuhan dukungan peralatan terkait kehumasan. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah diharapkan	Tersedia	Kebutuhan
1	PC	58	42	16
2	Laptop	58	42	16
3	Dispenser	6	4	2
4	Printer	13	11	2
5	Video Conference	1	0	1
6	Camcorder	5	4	1

C. Anggaran

Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM pada tahun awal tahun 2021 adalah sebesar **Rp 14.318.263.000**. Namun, dengan adanya Penghematan Anggaran APBNP, anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat hingga akhir tahun 2021 menjadi sebesar **Rp. 9.122.289.000**. Rincian anggaran dan realisasi sebelum maupun setelah pemotongan anggaran dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
A	b	c	d	e	f	g	h
	3158 Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM				9.122.289	9.108.166	99,85%
	3158.AEC.001 Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	70	83	118,5%	3.490.667	3.489.173	99,96%
1	051 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral	26	30	122,7%	1.521.133	1.521.057	100%
2	052 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Regional dan Multilateral	22	27	122,7%	368.213	367.641	99,84%
3	053 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Dalam Negeri	22	26	118,2%	662.541	662.195	99,95%
4	054 Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1	1	100%	938.780	938.280	99,95%
	3158.EAI.003 Layanan Kehumasan	200	230	115%	5.140.322	5.127.701	99,75%
1	051 Pemberitaan dan Hubungan Media	189	216	114,3%	1.867.806	1.856.884	99,42%
2	052 Publikasi	8	10	125%	1.498.694	1.498.352	99,98%
3	053 Pengelolaan opini publik	4	4	100,0%	1.773.822	1.772.491	99,92%
	3158.PEE.002 Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	1	1	100%	491.300	491.292	100%
1	051 Penyelenggaraan kerja sama dengan negara di Asia Pasifik/Afrika	1	1	100%	491.300	491.292	100%

BAB III HASIL KEGIATAN BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

A. Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global

SK1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global

IKK 1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
IKK 2	Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral

A.1. IKK 1: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$f=(d/cx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$
Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	84	88,49	105,34	1.125.468	1.125.101	99,97%

Sasaran Kegiatan ke-1 (SK1) Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global, diturunkan menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

- a. IKK1 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan; dan
- b. IKK2 Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Target IKK1 sebesar 84 terpenuhi dengan realisasi sebesar 88,49 atau 105,34% dengan kategori (Baik). Adapun pagu anggaran pada IKK1 adalah sebesar Rp.1.125.469.500,00; dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.125.100.664,00 atau 99,97% dengan kategori Baik.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK1, antara lain:

- a. Dukungan tim koordinasi kerja sama dalam negeri dari unit-unit kerja pusat maupun Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) dari seluruh Indonesia. Tim ini tergabung dalam forum komunikasi melalui *Whatsapp Group* yang memudahkan penyampaian informasi terkait kerja sama. Anggota tim diperbarui setiap awal tahun dan setiap anggota baru dapat langsung bergabung ke forum komunikasi.

- b. *Monitoring* dan evaluasi implementasi kerja sama secara berkala setiap triwulan (3 bulan).

Monitoring dan evaluasi (monev) penting dilakukan untuk memantau implementasi kerja sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Monev dilakukan secara periodik setiap triwulan untuk meningkatkan pemenuhan rencana kerja yang telah disusun antara unit pengusul dengan mitra kerja sama, selama jangka waktu kerja sama. Apabila terdapat kerja sama yang belum terpenuhi di awal tahun, maka unit pengusul dapat segera merumuskan tindak lanjut implementasi kerja sama pada periode berikutnya. Dengan demikian diharapkan seluruh kerja sama telah dapat terimplementasi sesuai rencana kerja sebelum jangka waktu kerja sama berakhir. Monev kerja sama juga merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan urgensi perpanjangan kerja sama setelah jangka waktu kerja sama berakhir. Kerja sama yang terimplementasi dengan baik dapat diperpanjang atau diperbarui, namun sebaliknya, kerja sama yang tidak terimplementasi dengan baik akan menjadi pertimbangan untuk tidak diperpanjang atau diperbarui.

- c. Pemanfaatan teknologi informasi

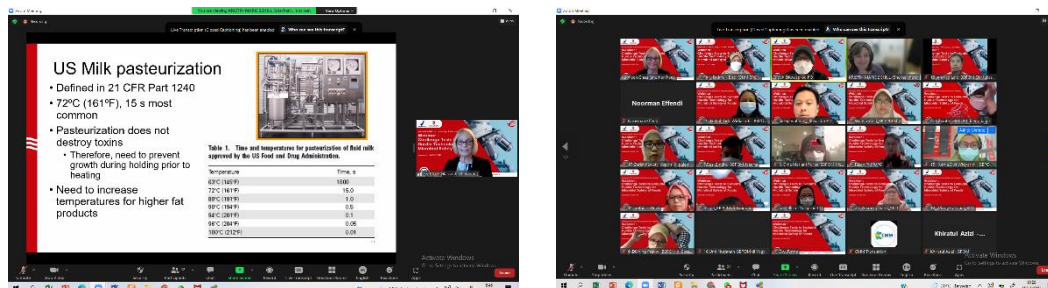
Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang dikembangkan oleh ANRI. Sistem ini memungkinkan pemantauan permohonan usulan kerja sama yang disampaikan oleh unit kerja. Selain itu, juga sedang dikembangkan Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES) yang akan dimanfaatkan untuk pengajuan usulan kerja sama, *monitoring* reviu dan telaah *legal drafting*, serta persetujuan pimpinan. Sistem ini juga terhubung dengan database kerja sama yang telah ditandatangani.

Dalam forum bilateral, kerja sama dengan mitra yang ditindaklanjuti berupa kolaborasi Badan POM dengan regulator mitra dalam rangka peningkatan *Capacity Building* di bidang pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:

- a. *Knowledge Sharing Strengthening Cooperation in The Field of Medicines Control* dengan *National Center for Expertise of Medicines and Medical Devices, Kazakhstan* (3 Maret 2021).



- b. *Webinar Development of Food Safety System for Dairy Products* bekerja sama dengan *University of Wisconsin-Madison*, Amerika Serikat (24-26 Agustus 2021).
- c. *Webinar Challenge Tests to Evaluate Hurdle Technology for Microbial Safety of Foods* bekerja sama dengan *University of Wisconsin-Madison*, Amerika Serikat (16-18 November 2021).



- d. *Webinar on Requirements for Food Registration and On-Site Inspection* bekerja sama dengan *Saudi Food and Drug Authority* (28 Desember 2021).

A.2. IKK 2: Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	C	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	84	89,02	105,98	1.037	1.037	99,98%

Target IKK2 sebesar 84 terpenuhi dengan realisasi sebesar 89,02 atau 105,98% dengan kategori (Baik). Adapun pagu anggaran pada IKK2 adalah sebesar Rp.1.037.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.036.792,- atau 99,98% dengan kategori Baik. Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK1, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait di BPOM, Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional, dll terkait penyampaian masukan;

- b. Penyusunan telaah, kajian serta usulan posisi BPOM terkait perundingan atau forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.

Pada tahun 2021, peran BPOM dalam forum bilateral berupa intensifikasi/fasilitasi koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kertas posisi Badan POM dalam perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra, sebagai berikut:

- a) Perundingan Indonesia *European Union* CEPA (IEU-CEPA) putaran ke-10 dan ke-11;
- b) *Technical Discussion/Technical Meeting* Rencana Kerja Sama Indonesia – Canada CEPA (ICA-CEPA);
- c) *Joint Negotiating Committee* (JNC) Indonesia-Pakistan *Trade in Goods Agreement* (IP-TIGA);
- d) *Working Group* (WG) *Meeting on the Review of the Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement* (BTA) 1970;
- e) Ratifikasi Perjanjian Indonesia Korea CEPA (IK-CEPA);
- f) Iran PTA;
- g) Pertemuan Kedua *Joint Feasibility Study Group* Indonesia-EAEU FTA;
- i) I-Iran PTA;
- j) Pertemuan Kedua *Joint Feasibility Study Group* Indonesia-EAEU FTA;
- k) *Joint Trade Review* RI-UK;
- l) Indonesia *Uni Arab Emirate* CEPA (IUAE-CEPA);
- m) *Follow-up Meeting of Joint Economic and Trade Commission* (JETC 8) RI-Swiss.

Selain perundingan perdagangan, dilakukan peninjauan kerja sama termasuk pembahasan MoU dengan *Counterpart* Badan POM di negara mitra, antara lain:

- a) Thailand FDA,
- b) *Michigan State University* Amerika Serikat,
- c) *Canadian Food Safety Agency* (CFIA) Kanada,
- d) *National Food and Drug Surveillance Institute* (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos or INVIMA) Republik Kolombia,
- e) *The State Institute of Drugs and Good Practices* (SID & GP) Federasi Rusia,
- f) *Ministry of Health of the State of Palestine* Palestina,
- g) *Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy* (PCIM&H) India,
- h) *Ministry of Health and Prevention Uni Emirat Arab, Iran Food and Drug Administration*.

B. Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

SK2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 3	Indeks kepuasan media
IKK 4	Indeks opini publik BPOM
IKK 5	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas

B.1. IKK 3: Indeks kepuasan media

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	F	g	$h=(g/f \times 100)$
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan media	74	76,64	103,57	314.838	314.832	100,00%

Realisasi Indeks kepuasan media pada Tahun 2021 adalah sebesar 76,64 dari target sebesar 74, sehingga capaian indikator adalah 103,57% dengan kategori “Baik” (Hijau).

Survey Indeks Kepuasan Media Badan POM merupakan survei tahunan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi media sekaligus memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kehumasan Badan POM.

Pengukuran Indeks ini dilakukan dengan mengacu pada 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut yaitu:

1. Unsur Persyaratan Pelayanan
2. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Unsur Jangka Waktu Pelayanan
4. Unsur Biaya/Tarif Pelayanan
5. Unsur Produk/ spesifikasi jenis pelayanan

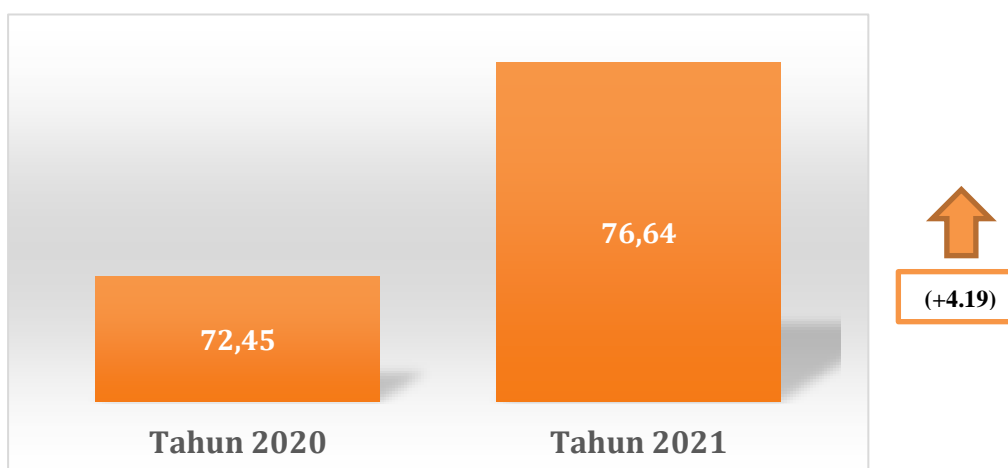
6. Unsur Sarana Prasarana
7. Unsur Kompetensi Pelaksana
8. Unsur Perilaku Pelaksana
9. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Indeks Kepuasan Media BPOM Tahun 2021 menunjukkan nilai indeks sebesar 76,64 atau masuk dalam kategori B (Baik). Indeks kepuasan tertinggi yaitu pada unsur biaya/tarif pelayanan (82,39), sedangkan terendah yaitu pada unsur jangka waktu pelayanan (72,42).

Unsur	Harapan	Kepuasan	Indeks Harapan	Indeks Kepuasan	Gap	Bobot	Bobot x Kepuasan
D.1. Persyaratan Pelayanan	3.24	3.07	80.98	76.63	-4.35	0.11	0.32
D.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.38	2.97	84.56	74.28	-10.28	0.11	0.33
D.3. Jangka Waktu Pelayanan	3.34	2.90	83.61	72.42	-11.19	0.11	0.31
D.4. Biaya/Tarif Pelayanan	3.41	3.30	85.21	82.39	-2.82	0.11	0.36
D.5. Produk/ spesifikasi jenis pelayanan	3.41	3.00	85.21	75.00	-10.21	0.11	0.33
D.6. Sarana Prasarana	3.47	3.22	86.69	80.55	-6.14	0.11	0.36
D.7. Kompetensi Pelaksana	3.46	2.97	86.62	74.30	-12.32	0.11	0.33
D.8. Perilaku Pelaksana	3.44	3.09	86.00	77.29	-8.71	0.11	0.35
D.9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.66	3.07	91.53	76.78	-14.75	0.12	0.36
Nilai angka kepuasan masyarakat							3.07
Indeks Kepuasan Masyarakat							76.64

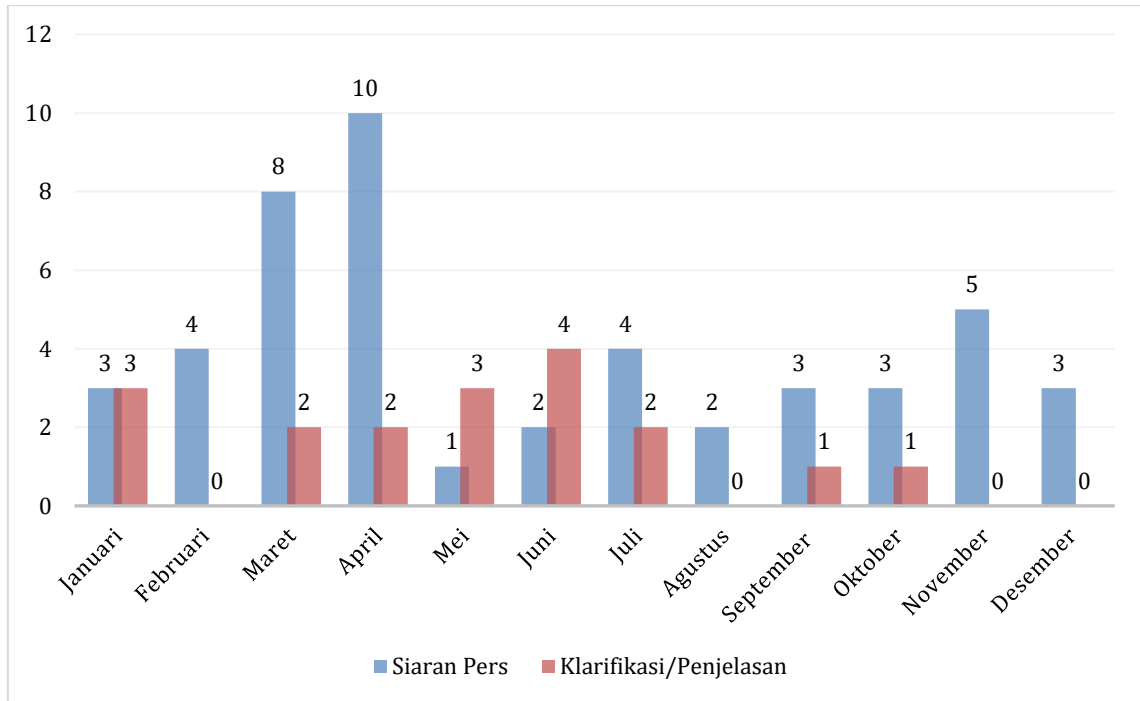
Tabel 6. Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Media Badan POM Tahun 2021

Dapat disimpulkan, Indeks Kepuasan Media Badan POM Tahun 2021 telah meningkat sebesar 4.19 poin dibanding tahun 2020 yang masuk dalam kategori C (Kurang baik dan perlu ditingkatkan) sebesar 72.45 dengan perbandingan sebagai berikut:

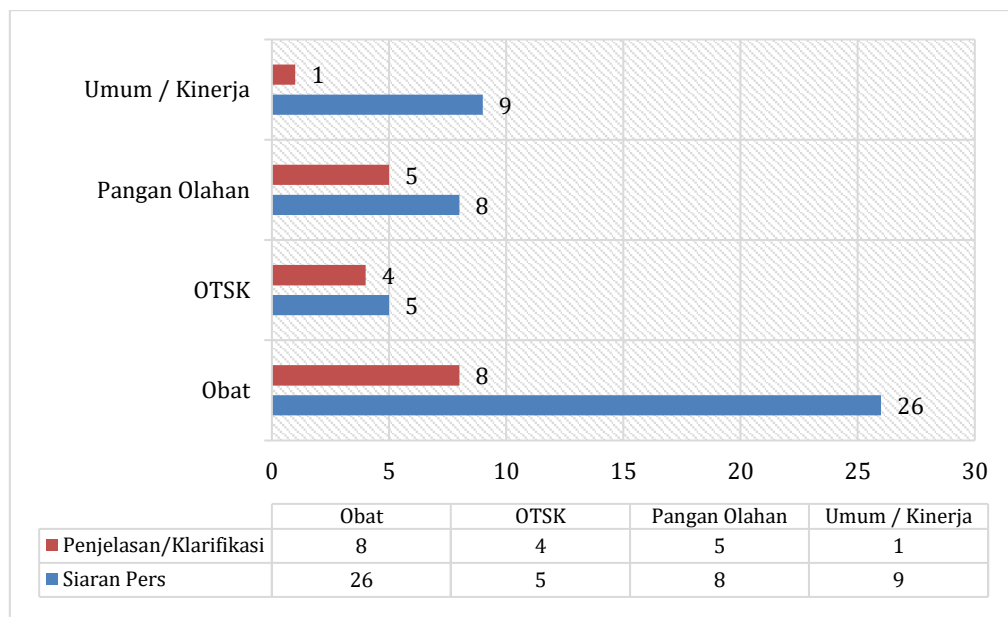


Perbandingan Indeks Kepuasan Media Badan POM di Tahun 2020 dan 2021

Pada tahun 2021, Badan POM telah menerbitkan 48 (empat puluh delapan) siaran pers dan 18 (delapan belas) penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Selama Januari – Desember 2021, penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan April yaitu sebanyak 10 (sepuluh) terbitan sedangkan penjelasan/klarifikasi paling banyak dipublikasikan di bulan Juni, yaitu 4 (empat) penjelasan.



Jumlah Penerbitan Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi Tahun 2021



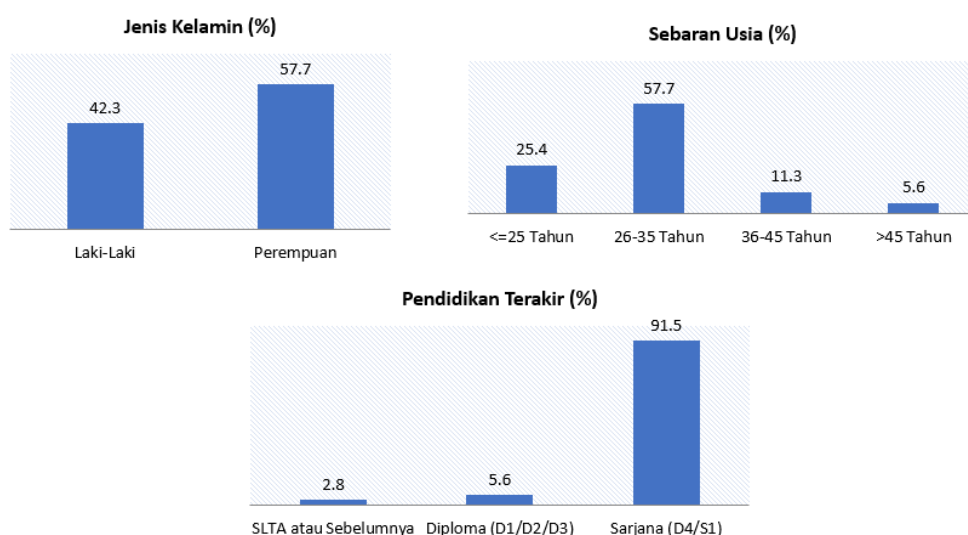
Jumlah Komoditas dalam Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi Tahun 2021

Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan melalui berita aktual yang diunggah pada website resmi Badan POM dan disebarakan kepada media massa. Tercatat sudah sepanjang tahun 2021 sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kegiatan, baik yang terselenggara di dalam kota maupun di luar kota. Namun demikian peliputan kegiatan Badan POM tidak seluruhnya dijadikan berita aktual apabila tidak bernilai strategis.

Responden pada survey ini merupakan media yang telah mendapatkan pelayanan kehumasan dari Badan POM sepanjang tahun 2021, baik terkait peliputan kegiatan, pengajuan permohonan narasumber wawancara/talkshow, pelaksanaan konferensi pers, atau kegiatan komunikasi dan pertemuan media lainnya.

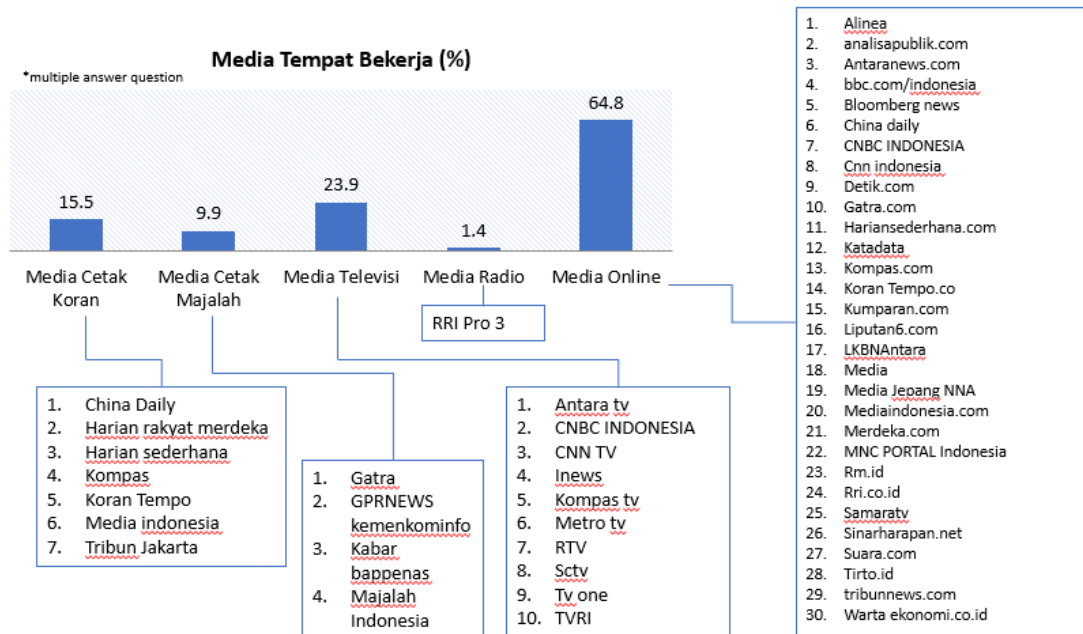
Responden survei terdiri dari 84 wartawan yang berasal dari daerah di Pulau Jawa dan Bali yang tercatat sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan kehumasan Badan POM dengan media di tahun 2021. Survei menggunakan $I_2 = 0.05$ dan d atau margin of error sebesar 0.07.

Profil demografi responden sebagian besar diwakilkan oleh kelompok usia 26-35 tahun (57,7%) dengan proporsi responden perempuan (sebanyak 57,7%), lebih banyak dibanding responden laki-laki (42,3%). Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden (91,5%) berpendidikan sarjana (D4/S1), selain itu terdapat responden dengan pendidikan terakhir diploma sebesar 5,6% dan pendidikan SLTA atau sebelumnya sebesar 2,8%.

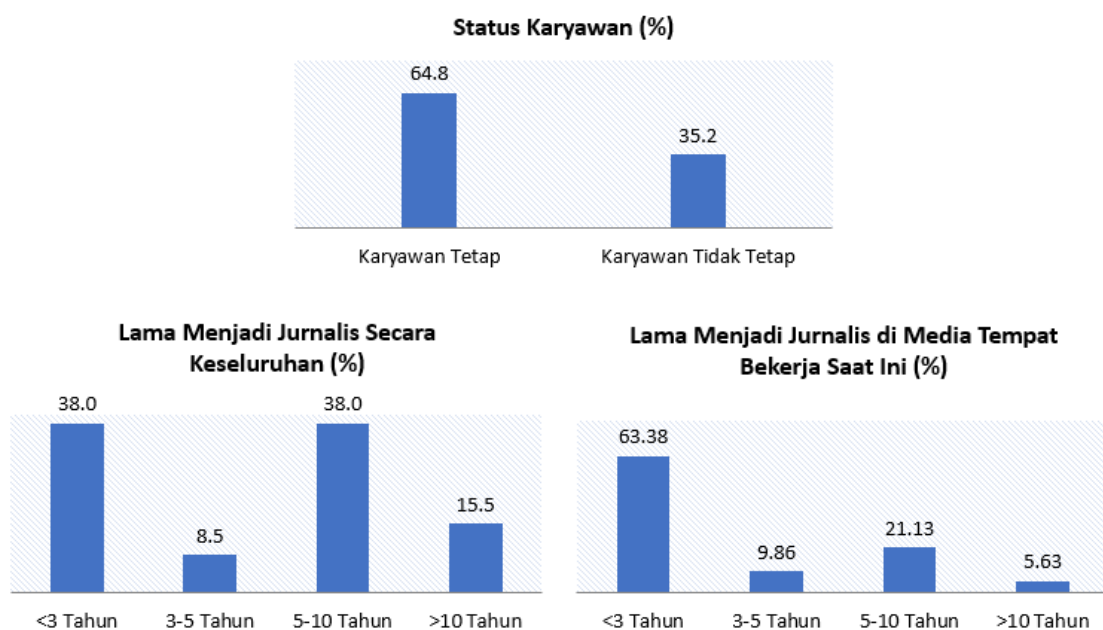


Profil Demografi Responden Survey Indeks Kepuasan Media Badan POM Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin, Sebaran Usia dan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan tempat bekerja menunjukkan adanya dominasi pekerjaan jurnalis di media *online* (64,8%), diikuti dengan media televisi (23,9%). Mayoritas responden berstatus sebagai karyawan tetap di media tempatnya bekerja (64,8%) dan telah menjadi jurnalis selama kurang dari 3 tahun, baik secara keseluruhan maupun di media tempat bekerja saat ini.



Profil Demografi Responden Survey Indeks Kepuasan Media Badan POM Tahun 2021 Berdasarkan Tempat Bekerja Media



Profil Demografi Responden Survey Indeks Kepuasan Media Badan POM Tahun 2021 Berdasarkan Status Karyawan, Lama Waktu Bekerja Sebagai Jurnalis

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas pelayanan liputan/wawancara/talkshow pada Badan POM sama dengan instansi lain;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai meliputi posisi tempat duduk dan pengambilan gambar yang disediakan Badan POM untuk wartawan dalam suatu acara, adanya ruang transit untuk media saat peliputan/wawancara, adanya konsumsi untuk media saat peliputan/wawancara, dan fasilitasi swab dan kelengkapan protokol kesehatan saat pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan media.;
- c. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan media; dan
- d. Kemudahan memahami informasi yang disampaikan Badan POM (melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos).

Berbagai upaya yang telah dilakukan s.d Triwulan IV tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1. Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada wartawan terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung dengan pimpinan Badan POM. Terutama untuk membatasi pertemuan secara fisik selama masa pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berlangsung.
2. Melakukan konferensi Pers dan *Media Briefing* sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan ini terdapat sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk berdiskusi terkait isu yang dibahas.
3. Menyebarkan siaran pers/*press release*, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik Badan POM kepada media, salah satunya melalui grup *Whatsapp* yang menjadi media komunikasi antara media dan Humas Badan POM.

B.2. IKK 4: Indeks Opini Publik

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	F	g	$h=(g/f \times 100)$
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks opini publik BPOM	78	82,55	105,83	1.094.991	1.094.004	99,91%

Realisasi Indeks Opini Publik BPOM pada Tahun 2021 adalah sebesar 82,55 dari target sebesar 78, sehingga capaian indikator adalah 105,83% dengan kategori “Baik” (Hijau).

Survei Indeks Opini Publik Masyarakat Terhadap Badan POM Dalam Rangka Pengelolaan Isu Tahun 2021 menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative & Qualitative Research*. Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1601 responden, dan *margin of error* sebesar 2.45% pada selang kepercayaan 95%.

Target sampel responden pada survei ini adalah rumah tangga. Pada setiap rumah tangga terpilih akan dipilih 1 (satu) orang anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun sebagai responden dan dilakukan wawancara terhadap responden tersebut. Jika jumlah anggota rumah tangga yang berusia 15 tahun ke atas lebih dari satu orang, maka dilakukan random/acak sederhana untuk mendapatkan satu responden yang memenuhi ketentuan (*eligible*).

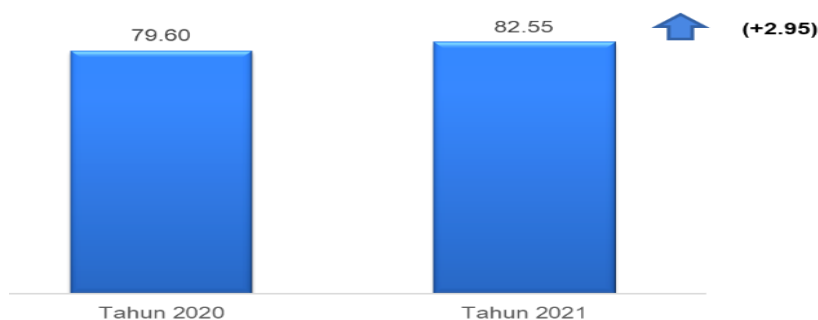
Profil demografi responden mewakili 75.66% wilayah perkotaan dan 24.34% wilayah pedesaan. Jumlah responden di wilayah perkotaan lebih banyak karena untuk mengevaluasi kinerja Badan POM dan Balai POM yang sebagian besar masih berlokasi di area perkotaan dan belum semua kabupaten yang ada di Indonesia terdapat Loka POM. Sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam survei adalah kelompok usia 26-55 tahun (73.40%), dengan proporsi antara responden laki-laki dan responden perempuan berimbang. Dari sisi pekerjaan, lebih banyak responden sebagai ibu rumah tangga (30.27%), wiraswasta (29.53%), dan pegawai swasta (12.67%). Sedangkan dari tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah lulusan SLTA (57.12%).

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.

2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan

Opini Publik terhadap Badan POM tahun 2021 mencapai indeks 82.55. Nilai ini meningkat 2.95 poin dibanding tahun 2020 (79.60) dengan rincian sebagai berikut:



Indeks Opini Publik (Nasional) Badan POM Tahun 2020 - 2021

Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik per aspek terlihat paling tinggi pada aspek kesehatan (83.13). Sementara aspek isu obat dan makanan memperoleh indeks sebesar 81.90. Sedangkan Indeks Opini Publik terendah terlihat pada aspek pelayanan publik (81.81). Indeks opini publik berdasarkan aspek secara detail dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Indeks Opini Publik terhadap Badan POM Tahun 2021 Berdasarkan Aspek

Dibandingkan dengan Indeks Opini Publik Badan POM per aspek tahun 2020, di tahun 2021 ini indeks per aspek juga mengalami kenaikan. Kenaikan nilai indeks tertinggi yaitu pada aspek pelayanan publik (+6.62 poin) dan aspek isu obat dan makanan (+4.31 poin).

Aspek	Tahun		Selisih
	2020	2021	
Aspek Kesehatan	81.58	83.13	▲ 1.55
Aspek Pelayanan Publik	75.19	81.81	▲ 6.62
Aspek Ekonomi	80.93	82.06	▲ 1.13
Aspek Penindakan	78.98	82.47	▲ 3.49
Aspek Peraturan	80.30	82.81	▲ 2.52
Aspek Isu Obat Dan Makanan	77.60	81.90	▲ 4.31

Indeks Opini Publik Badan POM Tahun 2020 – 2021 Berdasarkan Aspek

Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1. Menjalin hubungan baik dengan media dengan mengakomodir permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terutama Kementerian, Lembaga, institusi penelitian, maupun tokoh yang berpengaruh dalam masa pandemi untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19.
3. Meningkatkan publikasi informasi publik Badan POM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media teredukasi dan mendapatkan informasi Obat dan Makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini masyarakat terhadap Badan POM.

B.3. IKK 5: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
A	B	c	d	$e=(d/cx100)$	F	g	$h=(g/fx100)$
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,84	3,84	100%	431.196	430.524	99,84%

IKK 5 ditujukan untuk mengukur kepuasan internal terhadap layanan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melakukan survey kepuasan internal secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan) dengan hasil sebagaimana gambar berikut:



Survey mengukur kepuasan internal terhadap layanan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang mencakup:

1. Layanan Penyusunan MoU/PKS dalam negeri
2. Layanan Penyusunan MoU/PKS luar negeri
3. Layanan Penyusunan Bahan Kerja Sama Luar Negeri (Kertas Posisi, Talking Point, dll)

4. Layanan Administrasi/Persetujuan dan Exit Permit Perjalanan Dinas Luar Negeri
5. Layanan Export Consultation Desk (ECD)
6. Layanan Monitoring Pemberitaan terkait Obat dan Makanan
7. Layanan Permintaan Peliputan Kegiatan Strategis Badan POM
8. Layanan Publikasi Kegiatan Strategis Badan POM pada Media Sosial Resmi Badan POM, dan
9. Layanan Permohonan Wawancara dari Media

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK5, antara lain:

- a. Menyusun pedoman kerja sama;
- b. Mengembangkan Sistem Informassi Kerja Sama;
- c. Melakukan pemuktakhiran data pada aplikasi ECD;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan bahan kerja sama;
- e. Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis Badan POM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM, terutama yang melibatkan Kepala Badan POM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial oficial official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarakan ke media;
- f. Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi early warning system mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari Badan POM;
- g. Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan POM melalui berbagai akun official media social Badan POM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.

C. Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM

SK3. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM

IKK 6 Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu

IKK 6: Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	C	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	82	86,40	105,36%	388.982	388.550	99,89%

Realisasi pencapaian dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu sebesar 86,40% dari target 82% atau capaian sebesar 105,36%. Pengukuran tepat waktu berdasarkan waktu baku pada SOP terkait kerja sama dan hubungan masyarakat.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK6, antara lain:

- Melakukan tinjau ulang SOP disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam melakukan pembahasan Bersama, dll.
- Menyusun pedoman kerja sama dan pengembangan aplikasi terkait.

Dalam forum bilateral, telah dilaksanakan penandatanganan MOU Badan POM dengan Mitra di luar Negeri, sebagai berikut:

- Memorandum of Understanding (MoU) regarding The Safety and Quality of processed Food, Medicinal Products, Traditional Medicines, Cosmetics and Food Supplement dengan Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea (28 Januari 2021);*
- Memorandum of Understanding (MoU) on Regulatory Cooperation in The Field of Pharmaceutical and Cosmetics dengan National Medical Products Administration (NMPA) RRT (5 Juni 2021);*
- Memorandum of Understanding (MoU) dengan The Brazilian Health Regulatory Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA) Republik Federatif Brazil concerning on Sharing Information of COVID-19 Vaccines Regulation (16 Juni 2021);*

- d. *Memorandum of Cooperation (MOC) on Medical Products Regulation Dialogue and Cooperation Framework dengan Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) Jepang (27 Agustus 2021);*
- e. *Memorandum of Understanding (MoU) concerning Cooperation on Capacity Building dengan University of Wisconsin-Madison Amerika Serikat (23 September 2021);*



- f. *Memorandum of Understanding (MoU) concerning on Drug and Biological Product Control dengan Public Health Institute of Chile (Instituto de Salud Publica- ISP) Republik Chile (11 Oktober 2021).*

Dalam forum bilateral, rincian dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Dokumen Kerja Sama	Isu
1	Kertas Posisi Badan POM dalam PTA RI-Mauritius	Posisi Badan POM Terkait Persiapan Putaran Kedua PTA RI-Mauritius;
2	Kertas Posisi Badan POM dalam TNC II-PTA	Posisi Badan POM untuk Pertemuan Intersesi Trade Negotiating Committee (TNC) Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA);
3	<i>Talking Points Indonesian FDA Chairperson</i>	Fasilitasi Pertemuan Virtual Badan POM dengan Regulator Obat/Vaksin Abu Dhabi Departement of Health (AD DOH);
4	Kertas Posisi Badan POM kepada Panamanian Food Safety Authorities	Posisi Badan POM terhadap Competent Authorities of Food Control in Indonesia kepada Director of Panamanian Food Safety Authorities;
5	Kertas Posisi Badan POM dalam Vaksin Sputnik V Rusia	Posisi Badan POM terkait Perkembangan Kerja Sama Vaksin Sputnik V Rusia;
6	Kertas Posisi BPOM kepada Duta Besar Chile	Posisi Badan POM kepada Duta Besar Chile untuk Indonesia terkait

No	Dokumen Kerja Sama	Isu
		Summary Data Uji Klinik Vaksin Sinovac di Indonesia;
7	Kertas Posisi Badan POM kepada Vietnam	Posisi BPOM terhadap Permohonan Drug Administration of Vietnam untuk Verifikasi Produk dalam rangka Penerbitan Persetujuan Izin Edar di Vietnam
8	<i>Talking Points Indonesian FDA Chairperson</i>	Posisi Badan POM terkait Pertemuan dengan OGYEI di Hongaria
9	<i>Talking Points Indonesian FDA Chairperson</i>	Posisi Badan POM terkait Pertemuan dengan Gamaleya Institute di Moskow
10	<i>Talking Points Indonesian FDA Chairperson</i>	Posisi Badan POM terkait Pertemuan dengan Roszdravnadzor di Moskow
11	<i>Talking Points Indonesian FDA Chairperson</i>	Posisi Badan POM terkait Pertemuan dengan SID&GP di Moskow
12	<i>Talking Points Indonesian FDA Chairperson</i>	Posisi Badan POM terkait Pertemuan dengan BIOCAD di St. Petersburg
13	<i>Talking points Head of Cooperation and Public Relations Bureau</i>	Posisi Badan POM terkait Pertemuan virtual dengan Thailand FDA
14	<i>Talking points Head of Cooperation and Public Relations Bureau</i>	Posisi Badan POM terkait Pertemuan virtual dengan Kedubes Pakistan
15	<i>Talking points Head of Cooperation and Public Relations Bureau</i>	Posisi Badan POM terkait the 2nd JCC Meeting Badan POM-JICA
16	Bahan kerja sama ISUTW	Fasilitasi Coaching Regulasi dan Akses Pasar pada acara ISUTW (Juli)
17	Kertas Posisi Badan POM dalam IEU-CEPA	Penyampaian Posisi Badan POM pada Article Origin Marking pada Perundingan IEU-CEPA (Agustus)
18	Bahan kerja sama dengan SFDA	Penyampaian Posisi Badan POM terhadap Fasilitasi Ekspor ke Arab Saudi ke SFDA (Agustus)
19	Kertas Posisi Badan POM dalam Perundingan Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE – CEPA)	Penyampaian posisi Badan POM terkait Request/Offer List untuk Perdagangan Barang dalam Rangka Perundingan Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE – CEPA) (Agustus)

No	Dokumen Kerja Sama	Isu
20	Kertas Posisi Badan POM kepada NMRA Sri Lanka	Penyampaian posisi Badan POM terkait Kesediaan Badan POM dalam Pemberian Bantuan Teknis kepada NMRA Sri Lanka (Agustus)
21	MoU Badan POM dengan MHLW, NMPA-BPOM, ANVISA - BPOM	Penandatanganan MoU Badan POM dengan MHLW, NMPA-BPOM, ANVISA - BPOM (Agustus)
22	MoU Badan POM dengan UW-Madison	Penandatanganan MoU Badan POM dengan UW-Madison (September)
23	<i>Talking Points Indonesian FDA Chairperson</i>	Pertemuan Kepala Badan POM dengan Lembaga Riset di Amerika Serikat (September)
24	Kertas Posisi Badan POM kepada RRT terkait Pemberlakuan China's Decree 248	Penyampaian Masukan terkait Pemberlakuan China's Decree 248
25	Kertas Posisi Badan POM pada WG – TiG dalam Perundingan Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE – CEPA)	Penyampaian Update Masukan Usulan Initial Offer List Badan POM pada Working Group Trade in Goods (WG – TiG) dalam Perundingan Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE – CEPA)
26	Kertas Posisi Badan POM pada Isu dan Kepentingan Indonesia terhadap Amerika Serikat	Penyampaian Masukan tentang Isu dan Kepentingan Indonesia terhadap Amerika Serikat
27	Kertas Posisi Badan POM pada Indonesia–Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA)	Masukan Badan POM untuk Modalitas Perjanjian Indonesia–Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA)
28	Kertas Posisi Badan POM dalam Perundingan Indonesia – UAE CEPA	Penyampaian Masukan Opsi ke-2 Initial Offer List dalam Perundingan Indonesia – UAE CEPA
29	Bahan Dukung Partisipasi Badan POM dalam pada Expo 2020 Dubai	Penyampaian Daftar Produk Obat dan Makanan untuk <i>Rolling Exhibition</i> pada Expo 2020 Dubai

D. Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

SK4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

IKK 7 Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan

IKK 7: Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	1	1	100%	491.300	491.292	100,00%

Pada tahun 2021, Badan POM telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dalam kerangka program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Republik Demokratik Timor-Leste yang berupa “Workshop Pengujian Pangan dalam rangka Dukungan Badan POM untuk Perkuatan Pengawasan Pangan di Timor-Leste” kepada regulator dari Instituto para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL, I.P.) pada 29 November – 3 Desember 2021 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dan kontribusi Badan POM sebagai regulator di bidang pengawasan obat dan makanan terhadap Program KSS yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional (ProPN).

Program KSS Badan POM kali ini diikuti oleh 6 (enam) peserta dari IQTL, I.P. yang bertujuan untuk perkuatan pengawasan di bidang pengujian pangan, khususnya pengujian garam. Kegiatan ini diselenggarakan selama 5 (lima) hari dalam bentuk workshop yang terdiri dari penyampaian materi oleh narasumber mengenai Cara Berlaboratorium yang Baik dan Pengenalan Acuan/Metode Pengujian, Teknik Pengambilan Sampel, Sistem Manajemen Mutu: SNI ISO/IEC 17025:2017, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3), Fortifikasi Pangan dan SNI Garam, Analisis Gravimetri dan Volumetri, serta praktek pengujian di laboratorium Balai POM di Kupang menggunakan sampel garam dari Timor-Leste.

Pada pembukaan Workshop juga turut hadir Perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, Kepala Biro Kerja Sama dan Humas, Kepala Balai POM di Kupang, perwakilan dari Tim Koordinasi Nasional KSS Indonesia (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan), KBRI Dili, dan unit-unit terkait di Badan POM Pusat serta Balai POM di Kupang, serta narasumber dan peserta KSS.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK7, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait di BPOM dalam penyusunan materi peningkatan kapasitas Instituto para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL, I.P.);
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas Instituto para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL, I.P.).
- Penyusunan telaah, kajian serta usulan/rekomendasi terkait kerja sama selatan-selatan.

E. Sasaran Kegiatan 5. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

SK5. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 8	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media
IKK 9	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti
IKK 10	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting

E.1. IKK 8: Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,82	99,82	100%	1.744.021	1.733.233	99,38%

Realisasi persentase kualitas pemberitaan Badan POM di media pada Tahun 2021 adalah sebesar 99,82 dari target 99,82, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori "Baik" (Hijau). Hal ini disebabkan karena perhitungan jumlah seluruh berita tentang Badan POM merupakan data sampai dengan Triwulan IV dan bukan target berita 1 tahun. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan berita tentang BPOM yang bertonasi positif dan netral yang banyak beredar di berbagai media.

Indikator persentase kualitas pemberitaan Badan POM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait Badan POM di berbagai media cetak, elektronik, dan media online yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada Badan POM. Sedangkan kategori berita dengan tone netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan

nama Badan POM. Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan Badan POM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang Badan POM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang Badan POM dikalikan 100%.

Pada Tahun 2021, terdapat 35.865 berita tentang Badan POM yang memiliki tone berita positif dan netral dari 35.931 total berita tentang Badan POM, sehingga persentase kualitas pemberitaan Badan POM di media sebesar 99,82%. Dari 35.931 pemberitaan tersebut, distribusi sentimen berita mengenai Badan POM didominasi pemberitaan bertonasi netral, yaitu sebanyak 20.782 berita (57,84%), diikuti dengan pemberitaan bertonasi positif sebanyak 15.083 berita (41,98%) dan 66 berita (0,18%) bertonasi negatif.

Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	1.887	2.203	1	4.091
Februari	1.142	1.615	1	2.758
Maret	1.240	2.678	0	3.918
April	1.255	2.819	7	4.081
Mei	947	1.751	0	2.698
Juni	1.065	1.331	26	2.422
Juli	1.566	2.678	16	4.260
Agustus	981	1.094	2	2.077
September	1.173	1.171	0	2.344
Oktober	1.301	1.119	1	2.432
November	1.084	1.327	12	2.432
Desember	1.084	1.327	0	2.411



Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM hingga Triwulan 4 Tahun 2021

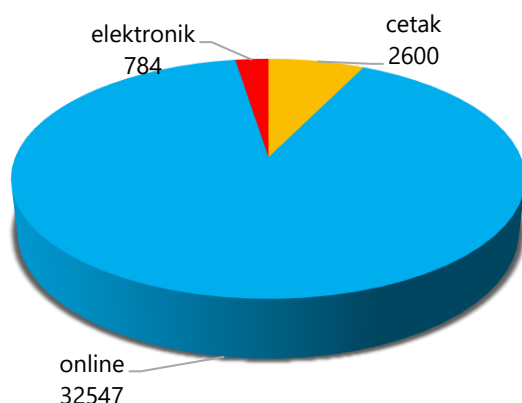


Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan 4 Tahun 2021

Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan melalui media *online*, yaitu sebanyak 32.547 berita (90,58%), selanjutnya diikuti 2.600 berita (7,24%) melalui media cetak dan 784 berita (2,18%) melalui media elektronik.

Januari	Februari	Maret
<p>Penerbitan EUA vaksin COVID-19 yang pertama kali diterbitkan dan vaksinasi perdana dilaksanakan</p>	<p>Penerbitan EUA yaitu untuk vaksin CoronaVac yang diizinkan digunakan untuk lansia serta vaksin COVID-19 produksi Bio Farma</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Isu penghentian penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca akibat pembekuan darah di Eropa • Isu terkait perizinan vaksin Nusantara yang dibahas pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI.
April	Mei	Juni
<ul style="list-style-type: none"> • Polemik vaksin Nusantara. Puncak pemberitaan terkait dilakukannya uji klinik fase kedua vaksin Nusantara terhadap beberapa tokoh, anggota DPR RI dan politisi. • Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Badan POM dan TNI AD yang mengubah status vaksin Nusantara menjadi penelitian berbasis penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Polemik vaksin AstraZeneca. Pemerintah menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 karena dilakukan pengujian toksisitas dan sterilitas untuk memastikan keamanan vaksin. • Badan POM terbitkan keterangan resmi yang menjelaskan bahwa nomor batch dimaksud tidak ada keterkaitan antara mutu dan KIPi yang dilaporkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Isu Kandungan BPA pada galon AMDK • Isu produk produksi Nestle yang tidak sehat • Isu penggunaan Ivermectin sebagai obat COVID-19.
Juli	Agustus	September
<ul style="list-style-type: none"> • Temuan Badan POM pada PT Harsen, promosi berlebihan Ivermectin, • Indofarma yang dapatkan izin edar untuk • ivermectin serta EAP untuk Ivermectin. • Badan POM terbitkan keterangan resmi bahwa Ivermectin masih dalam tahap uji klinik dan melarang berbagai pihak mempromosikannya sebagai obat COVID-19. • Kebakaran di Kantor Badan POM • Penerbitan EUA vaksin Moderna dan Pfizer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan EUA vaksin Sputnik-V asal Rusia dengan platform <i>Non-Replicating Viral Vector</i>. • Pemberian CPOB pada PT Biotis untuk produksi vaksin Merah Putih Bersama Unair. • Isu vaksin Nusantara terkait negara Turki yang disebut memesan 5,2 juta dosis yang memicu reaksi dari Anggota Komisi IX DPR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan EUA vaksin Janssen serta vaksin Convidecia. • Isu Susu Kental Manis (SKM) terkait pernyataan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang disebut melarang SKM dikonsumsi dengan cara diseduh. • Badan POM terbitkan keterangan resmi klarifikasi bahwa SKM tidak untuk menggantikan ASI dan tidak cocok dikonsumsi oleh bayi sampai usia 12 bulan dan • SKM tidak dianjurkan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu.
Oktober	November	Desember
<ul style="list-style-type: none"> • EUA vaksin Zifivax • <i>Public Warning</i> obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika mengandung bahan kimia obat/bahan dilarang tahun 2021. 	<p>EUA vaksin Sinovac dan vaksin produksi Bio Farma untuk anak usia 6-11 tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vaksin Sinovac terkait penggunaannya untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun. • Intensifikasi pengawasan pangan jelang Natal dan Tahun Baru

Kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. BPOM telah menyampaikan informasi mengenai kinerja dan pengawasan yang dilakukan seperti pemberitaan terkait penerbitan EUA obat dan vaksin COVID-19 termasuk persetujuan untuk vaksin anak yang menyita perhatian masyarakat dan banyak media.

- b. Meski pertemuan fisik dengan media sangat dibatasi, namun BPOM tetap melakukan pertemuan dengan media secara virtual untuk menyampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan, yang disertai dengan penerbitan siaran pers.
- c. Penjelasan Badan POM terhadap isu yang berkembang juga turut menunjang pencapaian indikator ini. Media dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, seperti untuk isu yang beredar tentang Bisfenol A (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Susu Kental Manis (SKM), regulasi Skema *Expanded Access Programs* (EAP) Ivermectin pada kondisi darurat, perkembangan Vaksin Merah Putih, Obat-obat COVID-19, dukungan dan pendampingan BPOM pada UMKM obat tradisional, pangan, dan kosmetika, simplifikasi dan deregulasi registrasi obat dan makanan, peningkatan kerja sama dengan negara lain terkait penanganan pandemic COVID-19, serta perubahan dan penguatan pengawasan obat dan makanan secara daring.

Upaya yang dilakukan terhadap keberhasilan indikator ini pada tahun 2021 antara lain:

- a. Badan POM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, *online*, maupun media sosial.
- b. Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

E.2. IKK 9: Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	65	65,91	101,40%	314.838	314.832	100,0%

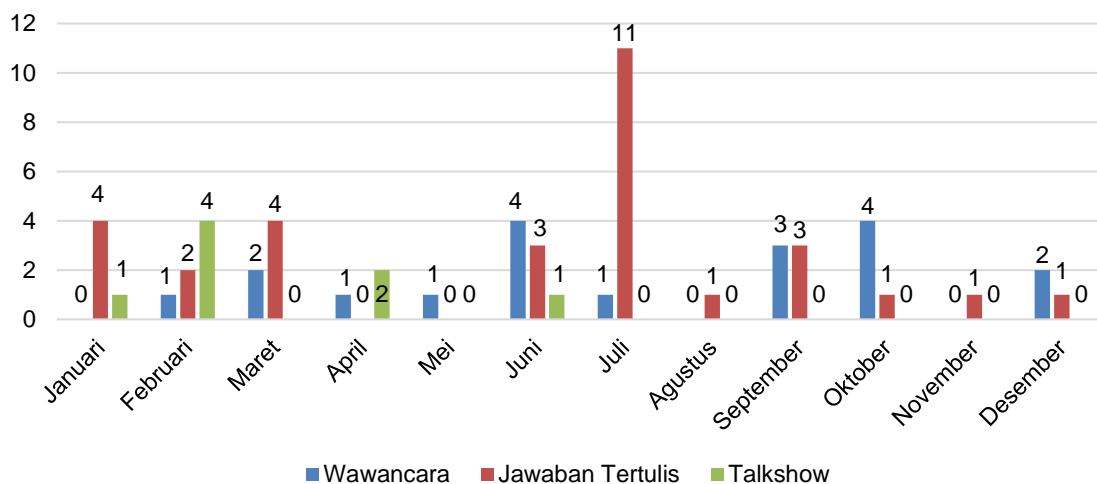
Realisasi Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti pada Tahun 2021 adalah sebesar 65,91 dari target 65, sehingga capaian indikator adalah 101,40% dengan kategori "Baik" (Hijau).

Pada Tahun 2021, telah dilakukan reuiu Renstra Sekretariat Utama dengan peta strategi terbaru dengan memperhatikan *baseline* berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Pada peta strategi tersebut, adanya penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk talkshow. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti adalah permohonan wawancara yang dipenuhi baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung maupun jawaban tertulis.

Cara perhitungan Indikator Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti adalah Persentase dihitung dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang masuk dengan jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dikalikan 100%.

Pada tahun 2021, dari 88 pelayanan informasi, telah dilakukan 58 (lima puluh delapan) kali kegiatan pelayanan informasi kepada media, dengan rincian 20 (dua puluh) wawancara langsung, 31 (tiga puluh satu) secara tertulis, dan 8 (delapan) *talkshow*, sehingga capaian 65,91%.



Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media Tahun 2021

Realisasi pelaksanaan wawancara/talkshow ini telah mencapai target sebesar 65,91 atau mencapai 101,40% dari target 65 untuk tahun 2021. Hal ini di antaranya disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Permohonan wawancara kepada Badan POM diajukan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan *link* penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
- Permohonan wawancara terkait hal-hal yang bukan merupakan tugas dan fungsi Badan POM telah dijelaskan bahwa Badan POM tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan hal tersebut dan mengarahkan media untuk menghubungi sumber lain yang lebih berwenang dan kompeten menjawab hal tersebut.
- Beberapa permohonan yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat terutama apabila terkait hal yang masih belum jelas dan belum ada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, telah direspon/ditindaklanjuti dengan menyampaikan bahwa Badan POM saat ini belum mengeluarkan pernyataan.
- Menjaga dan melindungi masyarakat dari informasi yang meresahkan menjadi salah satu pertimbangan utama di masa pandemi COVID-19 ini, selain terus memanfaatkan media untuk menyebarkan berbagai program pemerintah, seperti ayo pakai masker, segera vaksin, persetujuan 13 Vaksin COVID-19 yang diantaranya untuk anak usia 12 tahun ke atas dan 6-11 tahun sebagai upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Berbagai upaya yang telah dilakukan s.d Triwulan IV tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada wartawan terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung dengan pimpinan Badan POM. Terutama untuk membatasi pertemuan secara fisik selama masa pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berlangsung.
- Melakukan konferensi Pers dan *Media Briefing* sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan ini terdapat sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk berdiskusi terkait isu yang dibahas.
- Menyebarkan siaran pers/*press release*, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik Badan POM kepada media, salah satunya melalui grup *Whatsapp* yang menjadi media komunikasi antara media dan Humas Badan POM.

E.3. IKK 10: Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	C	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	80	87,01	108.76	1.498.694	1.498.352	99,98

Target IKK10 sebesar 80 terpenuhi dengan realisasi sebesar 87,01 atau 108,76% dengan kategori (Baik). Adapun pagu anggaran pada IKK10 adalah sebesar Rp.1.498.694.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.839.426.120,- atau 99,98% dengan kategori Baik.

Pada Tahun 2021, telah dilakukan *review* terhadap peta strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2021-2024 dengan organisasi dan tata kerja yang baru di Badan POM. Pada peta strategi tersebut, adanya penambahan indikator “persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda *setting*” merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Dengan telah disusunnya agenda *setting* publikasi tahun 2021 maka diperlukan adanya sebuah pengukuran terhadap realisasi dan capaian pelaksanaan agenda *setting* tersebut.

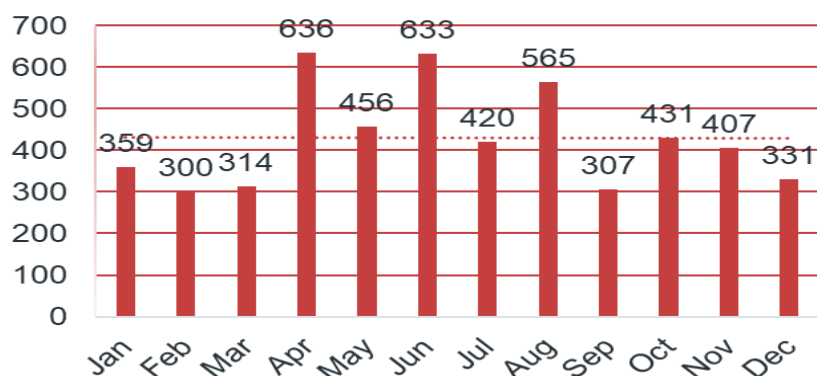
Penyusunan agenda *setting* publikasi tahun 2021 mengacu pada agenda *setting* pemerintah yang disusun oleh Kantor Staf Presiden dan mempertimbangkan rencana program serta kegiatan strategis Badan POM tahun 2021. Untuk melaksanakan agenda *setting* tersebut disusun kalender konten setiap bulannya dengan melibatkan tim pelaksana media sosial Badan POM. Kalender konten publikasi terdiri dari beberapa pilar konten antara lain konten kinerja, konten pelayanan publik, konten *greeting*, konten edukasi, dan konten santai/trivia.

Cara perhitungan indikator persentase publikasi kinerja Badan POM sesuai agenda *setting* adalah dengan membandingkan antara jumlah publikasi yang diunggah di platform media sosial dengan perencanaan dikalikan 100 %. Publikasi adalah pengunggahan materi baik berupa foto, infografis, motiongrafis, videografis ke berbagai akun resmi platform media sosial Badan POM (Instagram, fanpage Facebook, Youtube,

Twitter). Sedangkan agenda *setting* adalah perencanaan materi publikasi berdasarkan pemetaan isu obat dan makanan yang disusun tahunan, bulanan dan mingguan.

Tercapainya realisasi publikasi yang diunggah di *platform* media sosial melebihi dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa target indikator yang telah ditetapkan terlalu kecil, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target indikator pada tahun 2022. Koordinasi dan kerja sama yang baik di dalam tim pelaksana media sosial Badan POM sangat mendukung tercapainya target indikator tersebut. Selain itu adanya *brainstorming* dengan tim pelaksana media sosial Badan POM untuk menyusun kalender konten publikasi setiap bulannya juga menentukan keberhasilan pencapaian target.

Secara garis besar, total unggahan periode Januari sampai dengan Desember 2021 adalah 5.159 konten di berbagai *platform*, dengan rincian jumlah unggahan perbulan sebagai berikut:



Jumlah Total Unggahan Media Sosial Perbulan di Tahun 2021

F. Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal

SK6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal

IKK 11 Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 11: Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e = \frac{d}{c} \times 100$	f	g	$h = \frac{g}{f} \times 100$
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro	Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas	75	75,04	100,05%	387.383	387.100	99,93%

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Targe t	Reali sasi	Capaian	Pagu	Reali- sasi	Capaia n
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
Kerja Sama dan Humas yang optimal							

Sasaran Kegiatan ke-6 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal” diwujudkan dengan nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dicapai oleh Biro Kerja Sama dan Humas. Dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Penetapan road map pelaksanaan reformasi birokrasi harus secara konsisten dilaksanakan dan dipantau penerapannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung konsisten penerapan RB di 8 (delapan) area tersebut, diantaranya melalui:

1) Pemeliharaan dan peningkatan Quality Management System

a. Audit Internal QMS ISO 9001:2015

Audit internal merupakan suatu keharusan yang dilakukan dalam rangka penerapan implementasi sistem mutu. Pada audit internal akan diukur sejauh mana SOP dan instruksi kerja yang dijalankan dan mampu mencapai hasil yang diinginkan dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan proses. Dalam rangka memperbaiki kelemahan proses, Biro Kerja Sama dan Huas dituntut selalu melakukan *continuous improvement* dan mengkaji dokumen system mutu/instruksi kerja yang telah diterapkan secara berkala.

Audit internal QMS ISO 9001:2015 tahun 2021 dilakukan oleh auditor internal BPOM pada tanggal 3 s.d 4 Juni 2021 dengan hasil 2 AFI (Saran Perbaikan) dan 2 Aspek Positif, sebagai berikut:

a. Area for Improvement (AFI)

1. Di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat ditemukan bahwa evaluasi pelatihan hanya ditunjukkan hasil Diklat Latsar, sementara Diklat lain seperti diklat mandiri belum ada hasil evaluasinya terutama kaitannya dengan peningkatan kompetensi dan kinerja setelah pelatihan;
2. Dalam SOP POM-08.02/CFM.01/SOP.02 Layanan Kehumasan masih terdapat aktivitas yang belum menyebutkan standar mutu baku waktu. Agar

dipertimbangkan untuk dilengkapi dengan mutu baku dan justifikasinya di setiap SOP.

b. Positif Aspek

1. Mempertahankan Akuntabilitas Biro Kerja Sama memperoleh peredikat BB (Baik) Tahun 2018 dan 2019;
2. Selama 2020-2021, Badan POM mendapat rekognisi dari PR Indonesia di bidang relasi media, yaitu untuk kategori;
 - a. Lembaga Negara Terpopuler di Media Cetak (2020)
 - b. Lembaga Negara Terpopuler di Media Cetak (2021)
3. Fasilitasi Kerja Sama Strategis Badan POM dalam Mendukung Penanganan COVID-19.
4. Inisiasi Kolaborasi NMRA's Negara OKI dalam Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Vaksin COVID-19 melalui penyelenggaraan workshop virtual OKI dengan tema "*Enhancing Collaboration in Research, Manufacturing, Management of Medicines and Vaccines in the OIC Member States*", tanggal 9-10 Desember 2020.

b. Audit Eksternal dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015

Untuk mengetahui apakah Sistem manajemen mutu (QMS) sudah berjalan baik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan terhadap persyaratan tertentu perlu dilakukan audit oleh pihak eksternal.

Audit Eksternal dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015 tahun 2021 dilakukan oleh Tim Sucofindo tanggal 20 Agustus 2021 dengan hasil 1 Observasi dan 16 Aspek Positif. Observasi berupa Awareness Sistem Manajemen Mutu secara berkala perlu ditingkatkan pada seluruh personil yang ada termasuk kepada PPNPN. Dengan hasil tersebut, Tim Auditor merekomendasikan kembali terbitnya Sertifikat ISO 9001:2015 kepada Biro Kerja Sama dan Humas.

c. Internalisasi Reformasi Birokrasi

Internalisasi Reformasi Birokrasi di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk RB *Talk* sehingga dapat menarik minat para pegawai dan bersifat kekinian dengan topik, kuis, dan reward secara berkala. Pelaksanaan kegiatan internalisasi Reformasi Birokrasi (RB) dan budaya organisasi PIKKIR telah dilaksanakan pada:

1) Selasa, 30 April 2021

- a. Kegiatan RB Talk Bulan April 2021 dengan tema Kerja Sama Tim “*Team work makes the dream works*” bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta implementasi Budaya Organisasi Badan POM bagi pegawai terutama di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- b. Kegiatan RB Talk ini dihadiri oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan seluruh pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara hybrid meeting (luring dan daring).



2) Kamis, 22 Juli 2021

- a. Kegiatan RB Talk Bulan Juli 2021 dengan tema Budaya Organisasi Profesional dan Responsif “Ngopi Kawula Muda” bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta implementasi Budaya Organisasi Badan POM bagi pegawai di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, terutama pada nilai Profesionalitas dan Responsif.
- b. Kegiatan RB Talk ini dihadiri oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan seluruh pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara daring.
- c. Selanjutnya, Perwakilan dari Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Biro Kerja Sama dan Humas memberikan paparan dan informasi terkait Anti Gratifikasi.
- d. Pada sesi berikutnya dilaksanakan kegiatan “*sharing session*” dengan tema Budaya Organisasi Profesional dan Responsif “Ngopi Kawula Muda.”



3) Selasa, 17 Agustus 2021

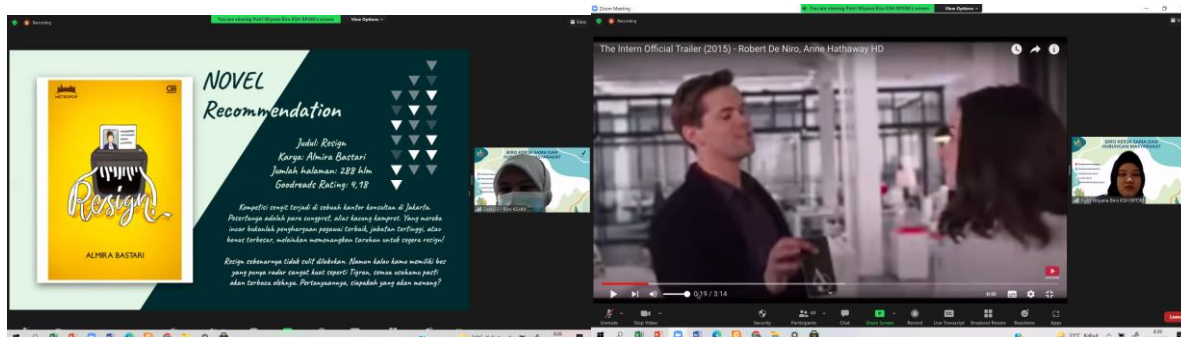
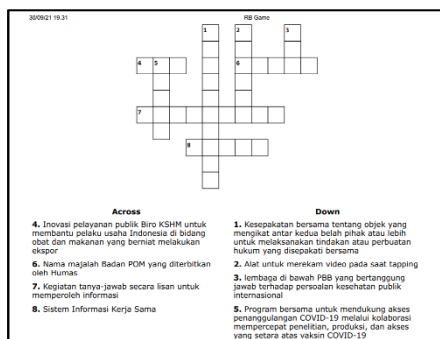
- a. Kegiatan RB Talk Bulan Agustus 2021 bertepatan dengan Peringatan HUT Republik Indonesia dengan tema yaitu “INDONESIA TANGGUH, INDONESIA TUMBUH” bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta implementasi Budaya Organisasi Badan POM bagi pegawai di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- b. Kegiatan RB *Talk* ini dihadiri oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan seluruh pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara daring.
- c. Setelah pelaksanaan Upacara Kenaikan Bendera Sang Saka Merah Putih, dilaksanakan Diseminasi Pelatihan Audit Internal. Sesi selanjutnya adalah kegiatan games, antara lain: Game Tebak Baju Adat Presiden RI pada upacara 17 Agustus, dan Game Seberapa “Merah Putih”kah anda?



4) Senin, 4 Oktober 2021

- a. Kegiatan RB Talk Bulan Oktober 2021 bertepatan dengan Apel Pagi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta implementasi Budaya Organisasi Badan POM bagi pegawai di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- b. Kegiatan RB *Talk* ini dihadiri oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan seluruh pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara daring.

- c. Setelah pelaksanaan Apel Pagi, dilaksanakan *Book and Movies Review*.
- d. Sesi selanjutnya adalah kegiatan *RB game* iuntuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mengenai istilah dan topik terkait semua bagian di Biro Kerja Sama dan Humas.



5) Jumat, 31 Desember 2021.

- a. Kegiatan RB Talk akhir Desember 2021 dengan tema Biro KSHM Ber-AKHLAK bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta implementasi core value ASN Ber-AKHLAK seperti yang telah diluncurkan oleh Kementerian PAN RB.
- b. Agenda RB Talk sebagai berikut:
 - Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK;
 - KIE penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)/Pemutaran video dari bit.ly/KIEAntiNarkoba;
 - Monev Kegiatan AoC Biro KSHM 2021;
 - Sesi Interaktif: Kesan dan Pesan Biro KSHM 2021;
 - Sesi Interaktif: Usulan kegiatan AoC Biro KSHM 2022



Kendala dan hambatan yang dirasakan antara lain kesulitan penjadwalan yang dapat diikuti oleh semua pegawai, karena terdapat kegiatan pimpinan yang penting, prioritas dan segera, terutama Kelompok Subtansi Hubungan Masyarakat yang harus melekat pada pimpinan.

Pagu kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas, yaitu sebesar Rp. 387.382.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 387.099.801,- (100%).

G. Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal

SK7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal

IKK 12 Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 12: Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Targ et	Realis asi	Capaian	Pag u	Realis asi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	81	83,81	103,46%	243.842	243.841	100%

Pengembangan kompetensi pegawai sangat diperlukan dalam sebuah organisasi karena dengan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawainya. BPOM secara konsisten terus berkomitmen dengan penerapan sistem merit dalam

pengelolaan manajemen kegawaian serta secara konsisten mendukung pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPOM guna peningkatan kinerja organisasi.

Kegiatan yang mendukung IKK 12 antara lain sebagai berikut:

- a) *Workshop Motivation and Inspiration For High Achievement Service Excellent.*
- b) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris.
- c) Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III untuk 6 orang CPNS Biro Kerja Sama dan Humas;
- d) Penyelenggaraan Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) Tahun 2021;
- e) Penyelenggaraan Webinar Kelas Kebal Hoax, dll.
- f) Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain: e-Learning Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sosialisasi Kearsipan, Webinar Penyusunan DUPAK JFT Pranata Humas, dll.

Kegiatan-kegiatan di atas diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Humas. Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp, 243.841.428,- (100%) dari alokasi anggaran Rp. 243.842.000,-







H. Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas

SK8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 13 Indeks pengelolaan data dan informasi

IKK 13: Indeks pengelolaan data dan informasi

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks pengelolaan data dan informasi	2	1	50%	45.900	45.900	100%

Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas pada tahun 2021 diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Pemanfaatan *e-mail corporate* BPOM;
- Pemutakhiran data di BPOM *Command Center* (BOC);
- Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Kepala Biro Kerja Sama dan Humas.

Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp. 45.900.000,- (100%) dari alokasi anggaran yang ditetapkan.

Namun, capaian indikator ini belum maksimal disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Pegawai Biro Kerja Sama dan Humas belum memanfaatkan secara optimal *email corporate - pom.go.id*
- Biro Kerja Sama dan Humas belum rutin memverifikasi data pada BOC;
- Biro Kerja Sama dan Humas belum rutin memanfaatkan data pada BOC;
- Data pada BoC masih terbatas dan belum dapat mendukung pelaksanaan kerja sama dan kehumasan.

I. Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel

SK9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel

IKK 14 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 14: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90 (efisien)	100 (efisien)	111,11 %	3.400	3.372	99,19%

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Biro Kerja Sama dan Humas, diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 13 (tiga belas) indikator kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.
- 2) Terdapat 1 (satu) indikator kegiatan yang belum efisien, yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi. Kegiatan tersebut tidak efisien karena rata-rata capaian anggaran yang digunakan lebih besar (input) dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja (output).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2021, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa fokus kepada dukungan visi dan misi BPOM serta penerapan *core value* ASN dan budaya organisasi PIKKIR.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, telah ditetapkan sasaran, indicator serta target kinerja yang terdiri dari 9 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan. Secara umum, pencapaian kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebesar 100,06% dengan kriteria “Baik”.

B. Saran

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus meningkatkan kinerja serta pelayanan dukungan manajemen BPOM. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat antara lain:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan;
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi, informasi dan digital dalam memberikan pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis teknologi.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
5. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

LAPORAN TAHUNAN

BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



BADAN POM

 @kerjasamahumasbpom

 kerjasamahumas@pom.go.id

 kshumasbpom